

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Belt and Road Initiative (BRI), program unggulan China dalam bidang perdagangan dan investasi internasional, bertujuan untuk memperkuat konektivitas dan kerja sama antar kawasan, khususnya Asia, Afrika, dan Eropa. BRI terdiri dari dua bagian utama: Sabuk Ekonomi Jalur Sutra (*The Belt*) dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 (*The Road*) (Omarov, 2022). *The Belt* mencakup jalur darat yang menghubungkan wilayah China dengan Eropa melalui Asia Tengah. Sementara itu, *The Road* adalah jalur maritim yang melintasi Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika Timur, dan Eropa, mencakup wilayah-wilayah seperti Laut Mediterania, Samudra Hindia, Atlantik, dan Pasifik, yang menjangkau lebih dari 20 negara (Igbinoba, 2017). Pada paruh pertama tahun 2022, investasi finansial dan kerja sama kontraktual yang dilakukan China di 147 negara mitra BRI mencapai total sekitar 28,4 miliar dolar AS (Nedopil, 2022).

BRI telah menciptakan enam koridor perdagangan utama, termasuk Cina-Indochina, Cina-Myanmar, Bangladesh-India, Cina-Pakistan, Cina-Asia Tengah-Asia Barat, Jembatan Darat Eurasia Baru, dan Cina-Mongolia-Rusia (Wong & Jia, 2017). Walaupun proyek ini telah memperluas kemitraannya secara signifikan, salah satu tantangan utama adalah minimnya keterlibatan India dalam inisiatif tersebut (Wijayasiri & Senaratne, 2018). Meski demikian, BRI tetap aktif menjalin hubungan perdagangan dan membangun kemitraan yang kuat dengan

Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka, meskipun India menunjukkan sikap yang kurang partisipatif.

Sebagian besar negara berkembang terlibat dalam BRI karena berbagai kendala, seperti keterbatasan keuangan, kekurangan modal fisik, dan kesenjangan teknologi (Kamburawala & Abeyrathne, 2022). Proyek-proyek dalam kerangka BRI mencakup berbagai sektor, termasuk transportasi, energi, air dan sanitasi, pembangunan perkotaan, serta teknologi informasi dan komunikasi, dan yang proyek-proyek tersebut adalah kawasan Asia Selatan (Wong & Jia, 2017).

Keterlibatan negara-negara Asia Selatan dengan BRI telah menarik perhatian internasional. Meskipun India, sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan ini, cenderung tidak ikut serta dalam BRI, negara-negara Asia Selatan yang lebih kecil—seperti Sri Lanka, Maladewa, Nepal, dan Bangladesh—telah membangun hubungan yang signifikan dengan BRI (Wong & Jia, 2017). Negara-negara ini memperoleh manfaat melalui berbagai proyek pembangunan di sektor perdagangan dan infrastruktur. Hubungan yang berkembang antara negara-negara kecil ini dan China harus dilihat dalam konteks yang lebih luas untuk memahami dinamika kerja sama tersebut (Samaranayake, 2019). Dalam statistik perdagangan, Amerika Serikat menjadi tujuan ekspor utama bagi beberapa negara Asia Selatan, seperti Sri Lanka dan Bangladesh, sementara China tetap menjadi salah satu pemasok impor terbesar di kawasan ini. Maladewa adalah satu-satunya negara kecil di Asia Selatan yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan China (Samaranayake, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi risiko dan peluang dari keterlibatan BRI di kawasan ini memerlukan pendekatan

yang kompleks. Dapat dikatakan terdapat dua tantangan utama yang dihadapi negara-negara Asia Selatan dalam konteks BRI, yaitu risiko keamanan geopolitik dan potensi jebakan utang luar negeri.

Setiap negara di kawasan ini memiliki pengalaman yang berbeda terkait keterlibatannya dengan BRI, negara Bangladesh, sebagian besar proyek-proyek BRI berfokus pada pengembangan sektor energi, infrastruktur, teknologi informasi, dan komunikasi, Bangladesh memperoleh pendanaan miliaran dolar untuk 27 proyek pembangunan. Beberapa proyek utama meliputi pembangunan dua pembangkit listrik (\$3 miliar), jalur kereta api Jembatan Padma (\$3,1 miliar), dan jaringan pita lebar (\$1,56 miliar), serta terminal bahan bakar (\$5 miliar) (Kallol, 2017). Meski Bangladesh telah menerima pinjaman besar dari BRI, negara ini dinilai tidak rentan terhadap risiko jebakan utang dan Bangladesh telah menggunakan dana BRI secara efektif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. (Samaranayake, 2019).

Negara Nepal, di sisi lain, memanfaatkan kerja sama BRI untuk mengurangi ketergantungan pada India dan membuka peluang baru. Investasi China di Nepal berfokus pada sektor transportasi, pariwisata, dan energi. Salah satu proyek penting adalah perjanjian pada 2018 yang mendukung pengembangan jalur kereta api antara Kathmandu dan Kerung di Tibet. Nepal juga menerima pendanaan seperti \$156 juta untuk Bandara Internasional Pokhara dan \$55 juta untuk kerja sama ekonomi dan teknis umum (Ministry of Finance Nepal, 2018). Walaupun Nepal menerima pinjaman dari BRI, tidak ada indikasi bahwa negara ini menghadapi risiko jebakan utang. Bahkan, Nepal dianggap sebagai penerima

manfaat terbesar dari BRI di kawasan ini, berkat tingginya jumlah hibah dan investasi asing langsung yang diterima (Samaranayake, 2019). Dengan pengelolaan yang baik, Nepal telah berhasil memaksimalkan manfaat dari BRI untuk mendukung pembangunan domestiknya.

Sri Lanka sebagai negara berkembang dan negara kawasan Asia Selatan yang berpartisipasi dalam BRI memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan meningkatkan infrastruktur, perdagangan, dan kerjasama investasi. Inisiatif ini dipandang sebagai sarana untuk membantu Sri Lanka keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dengan menyediakan dana yang sangat dibutuhkan untuk proyek-proyek pembangunan, seperti pelabuhan dan bandara, yang sangat penting bagi kemajuan ekonominya (Banda & Dharmadasa, 2019; Ruan et al., 2019). Fokus BRI pada koordinasi kebijakan dan pertukaran budaya juga menawarkan peluang bagi Sri Lanka untuk memperkuat hubungan bilateralnya dengan Cina dan negara-negara lain yang berpartisipasi (Banda & Dharmadasa, 2019).

China, sebagai salah satu kreditur utama Sri Lanka, telah memberikan bantuan finansial yang signifikan melalui berbagai saluran, termasuk investasi dalam proyek BRI. Investasi ini disalurkan melalui lembaga keuangan China seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Asian Development Bank (ADB), China Development Bank, dan EXIM Bank of China, serta melalui penanaman modal asing dari perusahaan-perusahaan China (Wignaraja et al., 2020). Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai proyek besar, termasuk pembangunan Colombo Port City, Pelabuhan Hambantota, Bandara

Internasional Mattala Rajapaksa, Pembangkit Listrik Norochchola, Terminal Peti Kemas Selatan Pelabuhan Kolombo, jalan raya dan jalan tol, air dan sanitasi, serta pembangunan kota (Zhu, 2015).

Proyek infrastruktur BRI di Sri Lanka berhasil menyelesaikan pembangunan fisik, tetapi mengalami kegagalan dari segi pengelolaan. Sri Lanka, sebagai pemilik sekaligus operator dari proyek-proyek ini, diharapkan mampu menghasilkan pendapatan signifikan (Kamburawala & Abeyrathne, 2022). Namun, kenyataannya pengelolaan yang kurang efektif membuat proyek-proyek ini gagal mencapai hasil ekonomi yang memadai. Bukannya menjadi pendorong pertumbuhan, proyek-proyek BRI justru kurang menguntungkan, terutama di tengah kondisi ekonomi negara yang stagnan (Wijayasiri & Senaratne, 2018). Akibatnya, kegagalan pengelolaan proyek BRI memberikan dampak ketergantungan Sri Lanka kepada China, dari segi perencanaan yang masih dinilai memaksakan, lalu eksekusi dalam mengoperasikan infrastruktur, serta sumber daya manusia Sri Lanka yang rendah sehingga mengandalkan sumber daya manusia China dalam proses dan eksekusinya. (Weerakoon, 2017; Li et al., 2021).

Proyek Belt and Road Initiative (BRI) di Sri Lanka telah menjadi sorotan karena masalah dalam pengelolaannya. Meskipun proyek-proyek besar ini dimaksudkan untuk mendorong pembangunan ekonomi, beberapa mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan tersebut (Jones & Hameiri, 2020). Berikut beberapa proyek infrastruktur yang gagal dalam pengelolaannya. Pelabuhan Hambantota yang sering menjadi contoh utama permasalahan BRI di Sri Lanka,

meskipun dibangun dengan harapan menjadi pusat perdagangan internasional, pelabuhan ini gagal menarik lalu lintas kapal yang cukup, di sisi lain kesulitan membayar hutang yang terkait dengan proyek ini, pemerintah Sri Lanka melalui *Hambantota Port Concession Agreement*, menyerahkan pelabuhan ini kepada China selama 99 tahun, serta China memiliki hak untuk mengelola wilayah sekitar Pelabuhan Hambantota dengan luas 11,5 Km² (Kavirathna et al., 2021). Kegagalan juga terlihat pada Bandara Internasional Mattala Rajapaksa, bandara ini dibangun dengan harapan menjadi pusat transportasi di Asia Selatan, namun kini dijuluki sebagai “bandara paling sepi di dunia” karena sangat sedikit penerbangan yang beroperasi. Masalah ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menambah beban utang negara (Staats, 2019). Proyek lain yang juga menghadapi masalah adalah Pembangkit Listrik Norocholai, yang meskipun diharapkan dapat menyediakan energi yang stabil, sering mengalami gangguan operasional yang menyebabkan pemadaman listrik berulang (Weerakoon, 2017). Proyek-proyek ini menunjukkan bahwa meskipun inisiatif BRI bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur, perencanaan yang kurang matang dan manajemen yang buruk dapat mengakibatkan ketidakefektifan dan risiko keuangan yang tinggi bagi Sri Lanka. Kegagalan ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih baik dalam pengelolaan proyek infrastruktur agar manfaat jangka panjang dapat dirasakan oleh negara.

Sri Lanka menjadi bagian dari penerima BRI dari kawasan Asia Selatan sama seperti Nepal dan Bangladesh dengan posisi yang sama yaitu negara berkembang. Nepal dan Bangladesh dapat mengelola dan mengoperasikan

proyek BRI dengan baik. Berbeda dengan Sri Lanka memiliki potensi yang besar melalui proyek BRI ini, namun hal ini hanya membawa petaka bagi negaranya, dengan dinamika di dalamnya seperti kurangnya transparansi dan korupsi, kehilangan kedaulatan, dan hasil dari investasi yang rendah.

Melalui penelitian ini, penulis memberikan penjelasan kegagalan pemerintahan Sri Lanka dalam mengelola proyek infrastruktur pada BRI serta menjelaskan ketergantungan Sri Lanka pada pinjaman luar negeri, terutama dari China melalui proyek BRI. Dalam menganalisis permasalahan ini, penulis juga akan mempertimbangkan berbagai aspek politik, ekonomi, dan faktor lainnya yang turut mempengaruhi kegagalan proyek-proyek ini. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika di balik kegagalan pengelolaan BRI di Sri Lanka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya ketidakmampuan Sri Lanka mengolah dana Belt Road and Initiative melalui Tributary System yang digunakan China sebagai negara debitur, sehingga muncul pertanyaan yang dapat dijadikan acuan untuk menjawab penelitian ini adalah ***“Mengapa Sri Lanka gagal dalam mengelola proyek infrastruktur pada Belt and Road Initiative?”***

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini sendiri penulis mengklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, sebagaimana akan diuraikan pada subbab dibawah ini:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah penulis akan menganalisis kegagalan pemerintah Sri Lanka dalam mengelola proyek infrastruktur Belt and Road Initiative yang diinvestasikan oleh China.

1.3.2 Tujuan Khusus

Melalui tulisan ini penulis secara khusus mempunyai tujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai Sri Lanka dalam sistem governance pada setiap kebijakannya dan hal tersebut membuat Sri Lanka menjadi gagal dalam mengatur negaranya yang berpengaruh pada kegagalan proyek BRI di Sri Lanka. Hal tersebut akan memiliki banyak pengaruh kecil maupun besar yang akan dijelaskan lebih mendalam sesuai dengan pandangan berbagai literatur.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis mendalam mengenai kegagalan pemerintah Sri Lanka dalam mengelola

infrastruktur pada proyek Belt and Road Initiative (BRI), yang berkontribusi terhadap krisis yang dihadapi negara tersebut. Melalui analisis yang dilakukan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan studi Hubungan Internasional, khususnya dalam memahami dampak kebijakan infrastruktur global terhadap stabilitas ekonomi dan politik suatu negara.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat luas yang tertarik dengan isu ini sebagai bentuk menambah wawasan maupun upaya pemecahan masalah yang relevan dengan isu ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

Sebelum memasuki konsep yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai tinjauan pustaka untuk membantu menyelesaikan penelitian ini.

Pertama yaitu artikel karya Mobley (2019) dengan judul *The Belt and Road Initiative: Insights from China's Backyard* dalam artikel ini disampaikan bahwa implementasi dana BRI Asia Selatan dan Tenggara merupakan upaya strategis untuk mencapai keunggulan dalam Asia-Pasifik dengan tindakan tersebut memberikan dampak untuk infrastruktur kepada berkembang seperti Kamboja, Myanmar, Pakistan, dan Sri Lanka. Kita ambil

bahasan dalam buku ini yaitu Sri Lanka, China melihat Sri Lanka sebagai aset penting untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, hal ini terlihat dalam pembangunan *Colombo International Financial City* dan Pelabuhan Hambantota dan masih banyak lainnya yang membuat Mobley berpendapat China melihat Sri Lanka salah satu negara penting dalam proyek BRI (Mobley, 2019).

Kedua, terdapat jurnal yang berjudul *China's Belt and Road Initiatives: Examining Debt Trap Diplomacy For Regional Supremacy In The Context Of Sri Lanka* karya Mishra & Mishra (2021), dalam tulisan ini China dengan Sri Lanka memiliki hubungan timbal balik dalam bentuk China membantu Sri Lanka dalam hal urusan diplomatik dan pembangunan infrastruktur dan Sri Lanka membantu China untuk meningkatkan pengaruh strategisnya di kawasan Asia Selatan. Di Sisi, infrastruktur ketidakmampuan Sri Lanka dalam mengembangkan dan menghasilkan keuntungan dari proyek-proyek pembangunan ini sangat mengkhawatirkan China, dengan total dana yang diberikan China melalui BRI mencapai US\$ 5,664 miliar, dimana 98% dari nominal tersebut merupakan pinjaman dan 2% nya adalah bentuk hibah kepada Sri Lanka. (Mishra & Mishra, 2021).

Ketiga, terdapat jurnal yang membahas hadirnya China di Sri Lanka, jurnal ini ditulis oleh Aslam, et. al. (2022) dengan judul *Tiongkok – Sri Lanka: Analisis Dampak Kehadiran Tiongkok di Sri Lanka*, dalam tulisan ini berpendapat bahwa bentuk bantuan yang diberikan China kepada Sri Lanka

membuat Sri Lanka sebagai negara penerima sangat bergantung dengan China sebagai negara donor, hal ini dikarenakan adanya bantuan dan yang diberikan negara pusat ke negara pinggiran, hal tersebut memang normal dilakukan oleh negara besar dan pastinya harus memberikan keuntungan kepada negara pusat. Namun berbeda dengan Sri Lanka, karena mereka terus bergantung namun tidak membuahkan hasil yang baik, yang membuat China sebagai negara pusat harus mengambil alih saham infrastruktur yang berasal dari dana BRI untuk Sri Lanka (Aslam, et. al., 2022).

Keempat, terdapat tulisan karya Wignaraja (2022) dengan judul *China's Dilemmas in Bailing Out Debt-Ridden Sri Lanka* dalam tulisan ini terdapat pernyataan menarik yaitu apakah China akan menyelamatkan Sri Lanka yang sedang terlilit hutang atau Sri Lanka harus mencari IMF untuk melunasi hutangnya, dengan ketidakstabilan perekonomian Sri Lanka Wignaraja menyatakan hanya China yang dapat membantu Sri Lanka untuk keluar dari krisisny hal ini dikarenakan China memberikan bantuan karena sudah memiliki hubungan yang baik dengan Sri Lanka selama 65 tahun maka dari itu China tidak ingin Sri lanka merasa tertekan karena telah menerima dana dalam jumlah yang besar (Wignaraja, 2022).

Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan pentingnya Sri Lanka dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) dan menyoroti hubungan strategis serta ekonomi antara Sri Lanka dan Tiongkok, seperti yang dibahas oleh Mobley (2019), Mishra & Mishra (2021), Aslam, et al. (2022), dan Wignaraja (2022).

Namun, terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami secara mendalam kegagalan pemerintah Sri Lanka dalam mengelola proyek-proyek infrastruktur BRI, terutama dari aspek tata kelola, perencanaan, dan eksekusi. Selain itu, dampak internal seperti korupsi, dominasi politik dinasti, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam konteks proyek BRI belum banyak dieksplorasi secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan fokus pada faktor-faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pengelolaan proyek infrastruktur BRI di Sri Lanka. Dengan menggunakan kerangka teori dependensi untuk menjelaskan ketergantungan struktural, serta konsep good governance dan failed state untuk menilai dinamika tata kelola yang menyebabkan kegagalan tersebut. Pendekatan ini dapat memberikan perspektif baru yang lebih komprehensif terhadap isu yang kompleks ini.

1.6 Kerangka Pemikiran Konseptual

Negara dalam komponennya terdiri dari sistem pemerintahan dan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan sendiri, terdapat konsep di dalamnya yaitu *government* dan *governance* (Sheng, 2009). Jika dilihat, dua kata ini memang memiliki kemiripan, namun pada hakikatnya memiliki tafsiran yang berbeda. *Government* memiliki arti pemerintah sedangkan *governance* memiliki arti pemerintahan. Untuk mendefinisikan secara lebih jelasnya, *government* lebih ke badan yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan di suatu negara sedangkan *governance* merupakan suatu bentuk *decisions making* untuk pemerintahan

dimana dalam prosesnya keputusan yang diambil diimplementasikan atau tidak. Dalam suatu pemerintahan setiap negara pasti memiliki caranya sendiri dalam mengelola pemerintahannya, ada yang kualitas pemerintahannya yang baik dan ada yang buruk. Hal tersebut akan berpengaruh kepada masa depan negara tersebut nantinya.

Good governance atau yang bisa disebut dengan tata kelola pemerintahan yang baik, jika didefinisikan secara umum yaitu suatu pelaksanaan manajemen pembangunan baik yang berkaitan dengan antar negara, pasar, antisipasi terhadap alokasi dana investasi dan menangkal kegiatan korupsi secara politik maupun administratif (Kharisma, 2014). Definisi lain mengenai *good governance* yaitu proses pengambilan keputusan dan proses penerapan keputusan, analisis tata kelola berfokus pada aktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasi keputusan yang dibuat serta struktur formal dan informal yang telah ditetapkan untuk mencapai dan melaksanakan keputusan tersebut (Sheng, 2009). Untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik akan berkaitan dengan proses dan hasil politik kelembagaan yang diperlukan bagi negara tersebut dan menghasilkan keberlanjutan pembangunan untuk suatu negara, untuk mencapai hal tersebut pemerintah merupakan salah satu aktor utama dalam keberlangsungan pemerintahan (Sheng, 2009).

Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik menurut pemikiran Sheng (2009) terdapat 8 karakteristik utama yang harus dipenuhi untuk mencapai *good governance*.

Gambar 1.1 Karakteristik Good Governance Pemikiran Sheng



Sumber: (Sheng, 2009)

Sebagaimana diungkapkan oleh Sheng (2009), mencakup pengelolaan wewenang politik, ekonomi, dan administratif dalam menjalankan pemerintahan pada berbagai tingkatan. Konsep ini berlandaskan delapan karakteristik utama yang saling melengkapi. Pertama, partisipasi, yang mengedepankan keterlibatan aktif semua elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan resmi. Kedua, kepatuhan terhadap hukum, yakni penegakan supremasi hukum yang adil dan tidak diskriminatif untuk memastikan bahwa semua individu dan institusi menaati aturan yang berlaku. Ketiga, transparansi, yang memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi terkait proses pengambilan keputusan, sehingga tercipta kejelasan dan akuntabilitas.

Karakteristik lain yang tak kalah penting adalah daya tanggap, yaitu kemampuan lembaga pemerintahan untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. *Good governance* juga mengedepankan konsensus,

dengan memprioritaskan tercapainya kesepakatan luas dalam menetapkan kebijakan yang paling bermanfaat bagi masyarakat umum. Selanjutnya, prinsip keadilan dan inklusivitas bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan dalam pembangunan, dan setiap individu merasa dilibatkan. Dua karakteristik terakhir adalah efektivitas dan efisiensi, yang menuntut optimalisasi penggunaan sumber daya demi memenuhi kebutuhan publik, serta akuntabilitas, yang mengharuskan para pemegang kebijakan bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakannya di hadapan publik maupun pemangku kepentingan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, Sheng menyatakan bahwa good governance dapat mencegah korupsi, melibatkan kelompok rentan, dan menjamin bahwa suara minoritas diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan (Sheng, 2009).

Dapat dikatakan bahwa untuk memenuhi delapan komponen ini sangat susah dan tidak secara cepat dan membutuhkan waktu yang panjang untuk mencapai kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu diperlukan waktu, modal, pengorbanan, dan menyamakan pikiran untuk satu tujuan yang sama dalam prosesnya. Melalui delapan karakteristik untuk mencapai tujuan sistem tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan keterlibatan semua pihak dalam prosesnya, jika hanya lembaga yang memangku kepentingan saja yang berusaha hal tersebut tidak saling melengkapi.

1.7. Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1. Good Governance

Dalam tulisannya yang berjudul “*What Is Governance?*”, Sheng (2009) mendefinisikan “*governance*” sebagai proses pengambilan keputusan dan cara keputusan tersebut diimplementasikan (atau tidak diimplementasikan). “*Good governance*” mengacu pada pelaksanaan wewenang politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola urusan suatu negara di semua tingkatan. Menurut Sheng, bentuk tata kelola adalah proses pengambilan dan implementasi keputusan yang dibuat serta struktur formal (pemerintah) dan informal (warga sipil) yang telah ditetapkan untuk mencapai dan melaksanakan keputusan tersebut. Terdapat enam indikator yang menjadi acuan dalam penerapan *good governance*, yaitu responsif, akuntabilitas, supremasi hukum, transparansi, inklusif dan openness to change, efektif dan efisien.

1.7.1.2. Failed State

Sri Lanka yang terpuruk dengan hadirnya BRI dapat dianalisis melalui konsep *failed state* menurut Acemoglu & Robinson (2012). Konsep ini membedakan sistem ekonomi-politik menjadi inklusif dan ekstraktif. Negara inklusif, yang umumnya lebih makmur, ditandai oleh pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sistem politik demokratis, dan pemerataan akses bagi masyarakat.

Sebaliknya, sistem ekstraktif, yang lazim ditemukan di negara miskin atau gagal, memusatkan kekuasaan dan kekayaan pada segelintir elite, mengabaikan kesejahteraan rakyat, dan mendorong ketimpangan. Dalam sistem ekstraktif, pemimpin cenderung memanfaatkan otoritas untuk kepentingan pribadi, mengorbankan fungsi dasar negara untuk rakyatnya (Acemoglu & Robinson, 2012).

1.7.2. Definisi Operasional

1.7.2.1. Good Governance

Penulis akan menggunakan analisis tata kelola pemerintahan Sri Lanka sebagai negara penerima dana investasi dari China melalui proyek BRI dengan dua aktor yang berperan penting sesuai dengan konsep *good governance* yaitu aktor formal (pemerintahan) yang menerima dan mengelola BRI dan aktor informal (warga sipil) yang merasakan manfaat dari proyek BRI. Terdapat enam indikator utama yang digunakan untuk membantu analisis permasalahan ini, yaitu:

Gambar 1.2 Indikator Good Governance



Sumber: (Sheng, 2009)

1. Responsif

Responsivitas pemerintah diukur dari kemampuannya memahami dan merespons kebutuhan masyarakat. Dalam kasus proyek Pelabuhan Hambantota dan Bandara Internasional Mattala Rajapaksa (dikenal sebagai "bandara kosong"), pemerintah Sri Lanka gagal merespons protes lokal terkait dampak sosial dan ekonomi. Pembangunan bandara, misalnya, tidak didasarkan pada kebutuhan riil transportasi udara, menyebabkan minimnya aktivitas operasional meskipun biaya pembangunannya sangat tinggi.

2. Akuntabilitas

Proyek BRI di Sri Lanka menunjukkan lemahnya akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan utang. Misalnya, pemerintah tidak transparan mengenai syarat-syarat pinjaman untuk pembangunan Pelabuhan Hambantota dan jalan tol *Southern Expressway*. Ketika proyek gagal memberikan pendapatan sesuai harapan, Sri Lanka menghadapi krisis pembayaran utang, yang akhirnya memaksa negara menyerahkan pelabuhan kepada perusahaan China melalui perjanjian sewa jangka panjang.

3. Supremasi Hukum

Ketiadaan supremasi hukum terlihat dalam proses tender proyek BRI di Sri Lanka. Banyak laporan menyebutkan adanya negosiasi langsung tanpa melalui proses kompetitif, seperti yang terjadi pada pembangunan Pelabuhan Colombo East Container

Terminal. Proses ini dianggap melanggar regulasi yang seharusnya memastikan transparansi dan persaingan sehat.

4. Transparansi

Kurangnya transparansi adalah salah satu masalah utama dalam proyek-proyek infrastruktur BRI di Sri Lanka. Perjanjian pinjaman untuk Pelabuhan Hambantota dan jalan tol Southern Expressway dirahasiakan, sehingga masyarakat tidak memiliki akses ke informasi rinci tentang biaya, risiko, dan dampak proyek tersebut. Hal ini memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

5. Inklusivitas

Proyek-proyek infrastruktur seperti Pelabuhan Hambantota dan Kawasan Industri yang direncanakan di sekitarnya tidak melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Banyak komunitas yang harus relokasi paksa tanpa kompensasi yang memadai. Pengabaian pandangan kelompok ini menimbulkan konflik sosial yang memperburuk keberlanjutan proyek.

6. Openness to Change

Pemerintah Sri Lanka menunjukkan resistensi terhadap kritik dan saran untuk menyesuaikan proyek-proyek BRI agar lebih berkelanjutan. Ketika muncul laporan mengenai ketidaklayakan ekonomi Bandara Internasional Mattala, pemerintah tetap

melanjutkan proyek tanpa evaluasi menyeluruh, yang berujung pada kegagalan fungsi bandara tersebut.

7. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi dapat dilihat dari hasil akhir proyek dibandingkan dengan investasi yang dikeluarkan. Bandara Mattala, yang menelan biaya jutaan dolar, menjadi bandara dengan aktivitas penumpang dan kargo yang sangat rendah. Demikian pula, Pelabuhan Hambantota tidak berhasil menarik lalu lintas perdagangan internasional yang cukup untuk menutupi biaya operasional dan membayar hutang.

Kasus-kasus ini menggambarkan bagaimana pelanggaran prinsip-prinsip good governance, seperti responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas, dapat menyebabkan kegagalan besar dalam proyek infrastruktur. Akibatnya, Sri Lanka terjerumus dalam krisis utang yang merugikan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

1.7.2.2. Failed State

Berdasarkan Acemoglu & Robinson (2012) failed state dapat dioperasionalkan sebagai ketidakmampuan Sri Lanka untuk memenuhi tanggung jawab utamanya sebagai negara, yang meliputi pengelolaan sumber daya ekonomi, pengambilan keputusan strategis, dan penyediaan manfaat langsung bagi rakyatnya dari proyek infrastruktur yang dikelola bersama China. Terdapat empat indikator

utama yang relevan dalam menganalisis kegagalan Sri Lanka, diantaranya:

1. Runtuhnya hukum, ketertiban, dan otoritas pemerintahan pusat

Indikator pertama ini melibatkan runtuhnya otoritas yang terpusat, yang mengakibatkan kekacauan dan kekerasan. implementasinya yaitu Kegagalan pemerintah Sri Lanka dalam mengelola proyek Pelabuhan Hambantota menunjukkan lemahnya otoritas pusat dalam mempertahankan kendali strategis. Karena utang besar yang tidak dapat dibayar, pelabuhan ini disewakan ke perusahaan China selama 99 tahun. Hal ini menimbulkan protes dan ketidakpuasan di masyarakat, yang menganggap keputusan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap kedaulatan negara, memperburuk ketertiban umum, dan memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintahan pusat.

2. Kehadiran Lembaga-Lembaga Ekstraktif

Institusi ekstraktif adalah institusi yang memusatkan kekuasaan dan kekayaan di tangan segelintir orang, mengabaikan layanan publik dan infrastruktur. China sebagai Institusi ekstraktif Pengelolaan proyek infrastruktur di bawah skema BRI lebih menguntungkan segelintir elite politik dan ekonomi daripada masyarakat luas. Elite lokal yang memiliki hubungan dekat

dengan investor asing cenderung mendapatkan keuntungan besar dari proyek ini, sementara layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan mengalami pengurangan anggaran. Hal ini memperparah kesenjangan ekonomi dan sosial di negara tersebut.

3. Eksploitasi Ekonomi

Penggunaan tenaga kerja paksa dan eksploitasi ekonomi, terutama di daerah yang kaya akan sumber daya alam, memperburuk ketidakstabilan. Dalam pengelolaan proyek infrastruktur BRI, Sri Lanka mengalami eksploitasi ekonomi dengan beban utang yang tidak seimbang dengan manfaat yang diterima. Proyek-proyek besar seperti Bandara Mattala dan Pelabuhan Hambantota, yang dibangun dengan dana pinjaman, gagal memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan. Hal ini memaksa pemerintah memberlakukan kebijakan penghematan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, termasuk kenaikan pajak dan pemotongan subsidi.

4. Konflik dan Ketidakstabilan Politik

Konflik dan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan merupakan indikator signifikan dari kegagalan negara. Prevalensi perang saudara dan perselisihan internal, yang didorong oleh lembaga-lembaga ekstraktif, berkontribusi pada kegagalan negara. Ketergantungan Sri Lanka pada investasi BRI memicu ketegangan politik internal. Penolakan sebagian pihak terhadap proyek-proyek

ini menciptakan polarisasi antara kelompok pendukung dan penentang kebijakan pemerintah. Konflik politik ini semakin intensif ketika muncul tuduhan korupsi dan nepotisme dalam pengelolaan proyek, yang memicu demonstrasi besar-besaran dan mengguncang stabilitas pemerintahan.

1.8. Argumen Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, argumentasi utama penyebab implementasi investasi China melalui BRI di Sri Lanka gagal adalah karena buruknya kualitas tata kelola pemerintahan Sri Lanka, yang tidak mampu mengelola proyek infrastruktur secara efektif. Hal ini mengakibatkan kegagalan mencapai tujuan utama dari investasi BRI, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik. Sebaliknya, Sri Lanka justru terjebak dalam ketergantungan berkepanjangan terhadap China, menghadapi kesulitan dalam pembayaran utang, kehilangan kepercayaan masyarakat, serta mengalami ketidakstabilan politik domestik yang semakin memperburuk kondisi negara.

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyortir, memfokuskan, dan mendalami satu isu permasalahan yang kemudian dikaji secara mendalam sehingga menghasilkan informasi yang bermakna (Sugiyono, 2013). Dalam hal ini, penulis akan menjadi instrumen utama yang mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk membangun

argumen yang kuat dan mendukung hasil penelitian. Melalui pendekatan ini, penulis akan memberikan analisis yang kritis dan komprehensif terkait kegagalan Sri Lanka dalam mengelola infrastruktur dari proyek Belt and Road Initiative (BRI), dengan fokus pada berbagai faktor yang mempengaruhi hasil proyek tersebut.

1.9.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif yang menggunakan metode kualitatif. Melalui tipe eksplanatif ini nantinya akan mendukung analisis terhadap tindakan yang diambil oleh subjek penelitian, sehingga dapat diungkap makna di balik tindakan tersebut. Penelitian ini berfokus pada pemahaman yang mendalam mengenai alasan dan penyebab kegagalan Sri Lanka dalam mengelola infrastrukturnya melalui proyek Belt and Road Initiative, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut.

1.9.2. Situs Penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini yaitu Sri Lanka namun segala informasi mengenai kebijakan maupun kegiatan yang berkaitan dengan penelitian ini dapat diakses secara luring. Oleh sebab itu, penelitian ini berlandaskan *desk research*, dengan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dari berbagai dokumen, laporan, jurnal, buku, artikel, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Seperti JSTOR, Google Scholar, serta World Bank Data.

1.9.3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat tiga subjek utama yang akan dianalisis. Pertama, pemerintahan Sri Lanka, kedua Belt and Road Initiative, dan ketiga pengelolaan infrastruktur Ketiga subjek utama ini akan dijadikan sebagai kunci dalam penelitian ini yang kemudian akan membantu dalam proses penganalisisan untuk membantu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.9.4. Jenis Data

Jenis data yang akan diimplementasikan dalam penelitian ini akan berbentuk data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, literatur, arsip, atau sumber-sumber lain yang mendukung dan relevan sesuai dengan subjek penelitian ini.

1.9.5. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam menunjang penelitian ini berupa data sekunder dimana penggunaan data sekunder akan menggunakan bahan bacaan serta penelitian terdahulu yang sudah ada dengan topik yang sejalan dengan penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen resmi dari Annual Report Kementerian Keuangan Sri Lanka dari tahun 2013-2022, Economic and Social Statistics of Sri Lanka 2013-2022, serta dokumen lainnya yang berasal dari kementerian Sri Lanka. selanjutnya

penelitian ini juga mengambil dari berbagai literatur seperti jurnal maupun buku dari JSTOR, Sciencedirect, Taylor and Francis, dan publikasi resmi lainnya. Penulis juga menggunakan artikel berita yang berkaitan dengan topik penelitian seperti BBC, CNN, dan media publikasi lainnya yang kredibel.

1.9.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian akademik yang menggunakan metode kualitatif melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari pengumpulan, penyajian, hingga interpretasi data yang bersifat non-numerik. Pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam mengenai konteks, makna, serta pengalaman subjek yang diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terkait fenomena yang diteliti.

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, dimana peneliti mulai mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dapat berupa wawancara dengan narasumber terkait, publikasi resmi, kebijakan yang diterapkan, pernyataan formal, atau sumber-sumber lain yang mendukung tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang terkumpul akan melalui tahap klasifikasi. Pada tahap ini, data dibaca dan diperiksa secara mendalam untuk memahami isinya. Peneliti kemudian memisahkan data yang

relevan dan mengklasifikasikannya berdasarkan fungsi serta relevansinya dengan variabel-variabel penelitian. Tahap terakhir adalah interpretasi dan analisis data, pada tahapan ini peneliti menghubungkan variabel-variabel yang ada dengan data yang telah dikumpulkan, mengacu pada teori atau konsep yang relevan. Setelah makna dari variabel-variabel tersebut ditarik, dilakukan analisis lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antar variabel yang diteliti.